

# ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM OPERASI PANGAN RIAU MAKMUR

**Yoanita Omandan Ernawati**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract: Analysis of Program Implementation Operation Food Riau Makmur.** The purpose of this study is to investigate the implementation and operation of programs affecting food aktoryang Riau Makmur held in Pelalawan on IP activity 200. This type of research is descriptive. Population as many as 538 farmers from four districts in implementing program activities Pelalawan IP 200. Set 54 farmers from 4 districts using proportional random sampling method. Types of data used are primary data and data collection techniques by using a questionnaire and data analysis techniques using descriptive techniques. Based on the survey results revealed that the implementation of the program of food operations Riau Makmur IP activities conducted on 200 not running as it should, it can be seen from rice production is not in accordance with what is expected so that the farmers did not experience an increase in outcome crops. In addition, 200 IP implementation issues in order to increase the growing season, are still experiencing problems, such as can be seen in the disbursement of funds kendalam the program of the government, which the government budgets of liquid in June while the IP 200 activities should be held in February. The conditions for farmers to delay planting costs in using IP 200.

**Abstrak: Analisis Implementasi Program Operasi Pangan Riau Makmur.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan aktoryang mempengaruhi program operasi pangan Riau Makmur yang dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan pada kegiatan IP 200. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi petani sebanyak 538 orang dari 4 kecamatan di Kabupaten Pelalawan yang melaksanakan program kegiatan IP 200. Ditetapkan 54 orang petani dari 4 kecamatan dengan menggunakan metode proporsional random sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket serta teknik analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program operasi pangan Riau Makmur yang dilaksanakan pada kegiatan IP 200 belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari produksi padi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga petani juga tidak mengalami peningkatan hasil panenannya. Selain itu juga masalah pelaksanaan kegiatan IP 200 dalam rangka menambah musim tanam, masih mengalami kendala, seperti dapat diketahui kendalam yang dalam pencairan dana program dari pemerintah, dimana anggaran dari pemerintah cair pada bulan juni sedangkan kegiatan IP 200 semestinya dilaksanakan pada bulan Februari. Kondisi ini menjadi keterlambatan bagi petani dalam menggunakan biaya kegiatan penanaman IP 200.

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan, operasi pangan, musim tanam, petani

## PENDAHULUAN

Provinsi Riau yang merupakan salah satu daerah yang membutuhkan beras merasa perlu melakukan upaya nyata dalam rangka mengatasi masalah beras. Provinsi Riau setiap tahunnya mengalami kekurangan beras yang sangat besar yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan beras tanpa mampu di-iringi dengan pertumbuhan produksi beras. Rata-rata setiap tahunnya mengalami kekurangan beras mencapai hampir 50 %.

Memperhatikan kondisi di atas, maka Pemerintah Provinsi Riau mengambil kebijakan pembangunan pertanian, terutama tanaman padi. Dibuatlah program khusus berupa Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi tanaman padi dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi yang setiap tahunnya semakin meningkat serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tani di pedesaan juga untuk menanggulangi kemiskinan menuju masyarakat tani sejahtera dengan strategi produksi tanaman

pangan berupa penguatan kelembagaan dan pembiayaan, pengamanan produksi, perluasan areal dan peningkatan produktifitas yang di-mulai sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Kegiatan ini dilaksanakan di 10 (sepuluh) kabupaten yang ada di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Program peningkatan produksi tanaman pangan berupa kegiatan cetak sawah baru (CSB) dan rehabilitasi sawah terolantar (RST) dalam rangka perluasan areal tanam dan kegiatan IP 200 berupa penambahan musim tanam dalam rangka peningkatan produktifitas tanam padi pada Program OPRM. Musim tanam yang bersifat alami ditambah dengan musim tanam kegiatan OPRM yang diharapkan dengan lahan yang sama akan mampu menghasilkan produksi padi berlipat ganda.

Kegiatan IP 200 merupakan upaya peningkatan produksi atau produktifitas lahan melalui penambahan musim tanam yang dilakukan pada periode Februari s/d Agustus atau kegiatan penanaman yang dilakukan oleh petani diluar tanaman reguler yang biayanya dilaksanakan pada periode bulan September s/d Januari dengan target dan realisasi kegiatan IP 200 di Provinsi Riau dari tahun 2009-2010. Kegiatan IP 200 yang dilaksanakan pada program OPRM dari target sebesar 16.409,80 Ha ha-nya terealisasi sebesar 9.178,00 Ha atau 55,9% dengan kabupaten yang mencapai atau melebihi target yaitu Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu dan Kab. Kep. Meranti, sedang 7 (tujuh) kabupaten lainnya yang mendapat kegiatan IP 200 dengan realisasi dibawah 50 %.

Kabupaten Pelalawan dari tahun 2009 s/d 2010 merupakan salah satu sasaran utama program kegiatan Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) setelah Indragiri Hilir dengan target seluas 5.900 ha dan Rokan Hilir dengan target seluas 4.900 ha dan Kabupaten Pelalawan dengan target luas tanam seluas 2.950 Ha. Dari target sebesar 2.950 ha di Kabupaten Pelalawan

terealisasi seluas 1.177 Ha atau 45.4%.

Apabila dilihat dari perimbangan produksi dan kebutuhan konsumsi padi tahun 2006–2010 produksi padi di Kabupaten Pelalawan masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Oleh karenanya pemerintah berdasarkan MoU Gubri – Bupati Pelalawan No. 74/MoU/2009 dan No. Pllw/180/2009/05 dilanjutkan dengan pernyataan bersama antara Bupati Pelalawan dengan 5 (lima) Kecamatan tentang pelaksanaan pemngembangan tanaman padi seluas 19.466.20 Ha melalui OPRM tahun 2009-2013. Guna mendukung kegiatan IP.200 pada program OPRM kepada setiap petani telah diberi bantuan antara lain bantuan benih, bantuan pupuk, bantuan peralatan usaha tani dan bantuan biaya pengolahan lahan baik dari dana APBD Provinsi Riau maupun dana APBD Kabupaten Pelalawan dengan rincian bantuan

Keberhasilan pembangunan pertanian terutama tanaman padi secara umum tidak hanya bisa dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana usaha tani, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh karekteristik petani itu sendiri, ketepatan waktu musim tanam dan ketepatan waktu penyaluran bantuan. Untuk tahun 2010 di Kabupaten Pelalawan untuk kegiatan IP 200 ditargetkan seluas 1.885 ha yang tersebar di 4 (empat) kecamatan dan 6 Desa dan 51 kelompok tani yang dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Juni 2010 dengan realisasi seluas 1.077 ha atau 58 % dari target dengan

Pasca pelaksanaan program ini produksi pada cenderung menurun, padahal pemerintah sudah menyiapkan anggaran dan menyalurkankannya untuk penambahan musim tanam, hal ini dengan harapan produksi padi pada tahun berjalan mengalami peningkatan. Penambahan musim tanam pada periode alami yakni bulan September hingga Januari menjadi potensi produksi pertanian tersendiri, kemudian pemerintah membuat program IP 200 dengan masa tanam pada periode Februari s/d Agustus menjadi potensi tersendiri bagi masyarakat petani untuk menambah produksi padi.

Menurut Abidin (2002) istilah publik mengandung tiga konotasi: pemerintah, masyarakat dan umum. Ini dapat dilihat dari dimensi subjek,

kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah yang resmi dan masyarakat untuk mematuhi. Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian publik disini adalah masyarakat. Sedangkan pengertian umum dari istilah publik dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis

Lebih lanjut dikemukakan Nugroho (2006) bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrasi publik. kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan aktor yang mempengaruhi Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan pada kegiatan IP 200.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi petani sebanyak 538 orang dari 4 kecamatan di Kabupaten Pelalawan yang melaksanakan program kegiatan IP 200. Ditetapkan 54 orang petani dari 4 kecamatan dengan menggunakan metode proporsional random sampling. Dat primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini dan angket digunakan untuk pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif.

## **HASIL**

### **Implementasi Program OPRM**

Implementasi Program OPRM IP 200 adalah proses intervensi sumber daya dalam mencapai tujuan. Dimensinya implementasi program antara lain dilihat dari *content of policy*, terdiri dari: *interests affected*, *type of benefits*; *extent of change envisioned*; *site of decision making*; *program implementators*;

*resources committed*. Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang ditujukan kepada responden penelitian, sebagai berikut:

### **Interests Affected**

*Interests affected* adalah dampak kepentingan dari kebijakan OPRM IP 200 ini terhadap petani. Dampak ini dilihat dari peningkatan penghasilan petani padi dengan diterapkannya kebijakan OPRM IP 200. OPRM IP 200 adalah jenis program penanaman padi dua kali setahun, yakni pelaksanaan program di selabertani secara alami yakni yang dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Januari. Kemudian penambahan masa tanam dilakukan pada bulan Februari hingga Juli.

Dari hasil survey diketahui bahwa dengan diterapkannya program tanam dua kali setahun, pada dasarnya tidak menambah penghasilan petani. Hal ini karena kebutuhan dana penanaman pada bulan Februari yakni pada masa tanam program tidak bisa dijalankan dengan baik oleh petani, petani tetap saja berkonsentrasi menanam secara alami pada bulan Agustus.

Alasan ini juga diperkuat oleh jawaban petugas lapangan dari hasil wawancara di lapangan mengenai kondisi real berkaitan dengan masalah mengapa dengan diterapkannya dua masa tanam belum membuat petani mengalami peningkatan hasil pertaniannya, bahwa dengan diterapkannya program masa tanam dua kali setahun, masih belum mampu meningkatkan penghasilan petani. Hal ini karena pencairan dana untuk masa tanam bulan Januari yang merupakan program OPRM IP 200 tidak disediakan pemerintah dan pemerintah baru bisa mengeluarkan anggaran yakni pada bulan Juni untuk ketuk palu atau pengesahan anggaran pada setiap tahunnya.

### **Type of Benefits**

*Type of benefits* adalah keuntungan yang diperoleh petani terhadap pelaksanaan program OPRM IP 200. Berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh petani dengan penerapan program pemerintah yakni program OPRM ini berkaitan dengan penggunaan lahan yang lebih efektif, yakni dengan dilakukan penanaman pada lahan yang sama dengan kondisi ini diharapkan lahan menjadi lebih produktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan berkaitan dengan apakah menguntungkan bagi petani dengan penerapan program masa tanam OPRM IP 200 pada lahan petani, jawaban responden tentang keuntungan yang diperoleh petani dengan diterapkannya model penanaman padi dua periode setahun, sebagian besar petani menganggap kurang menguntungkan. Hal ini, karena petani menganggap dengan dua kali tanam menyebabkan mereka terpaksa mengeluarkan biaya yang lebih banyak, kemudian juga dapat diketahui kemampuan petani akan pendanaan semakin terbatas. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan petani terpaksa berhutang kepada tengkulak dan hal ini sangat merugikan pihak petani, karena tambahan hasil panen yang diharapkan diperoleh akan semakin berkurang karena harus dibagi kepada tengkulak.

Kemudian mengharapkan kucuran anggaran dari petani, masih belum terealisasi, karena sistem anggaran pemerintah daerah, harus cair pada bulan Juni sedangkan kebutuhan petani pada bulan Februari. Ini bermakna terpaksa petani harus meminjam dari pihak lain yang memiliki dana. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa menunggu anggaran cair terpaksa para petani harus meminjam. Program yang dibuat pemerintah yakni dengan menerapkan masa tanam dua kali setahun dinilai tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan, dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbeda dengan kondisi musim tanam menyebabkan para petani kurang mendapatkan keuntungan.

Hal ini membuktikan program OPRM IP 200 ini dinilai kurang efisien dalam pelaksanaannya, karena harus waktu penyaluran anggaran tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.

### ***Extent of Change Envisioned***

*Extent of change envisioned* adalah perubahan yang diharapkan oleh petani setelah melaksanakan program OPRM IP 200. Perubahan yang diharapkan petani padi dengan diterapkannya sistem tanam dua kali setahun adalah semakin sejahtera mereka. Kesejahteraan mereka di sini dalam hal sandang, pangan dan papan. Hasil dari program OPRM ini diharapkan akan membawa perubahan kepada kesejahteraan pe-

tani, dengan bertani padi mereka mendapatkan hasil lebih dan dapat mereka gunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari, kemudian menyediakan tempat tinggal yang layak dan juga membeli pakaian untuk keluarga mereka.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan berkaitan dengan perubahan yang terjadi dengan adanya penerapan sistem tanam ini, diketahui bahwa belum adanya perubahan yang berarti kepada keluarga petani dengan diterapkannya sistem tanam dua kali setahun. Kebiasaan petani bertani pada musim tanam alami sulit untuk dirubah dan bahkan di tambah untuk bertani pada musim yang lain. Kondisi ini disebabkan karena petani, bekerja selain sebagai petani mereka juga mencari ikan dan juga kegiatan lainnya juga ikut dilakukannya. Jadi pada dasarnya petani yang berada di Kabupaten Pelalawan tidak hanya mengandalkan dari hasil pertanian saja. Berbeda dengan kondisi yang terjadi di tanah jawa atau padang. Mereka memang benar-benar mengandalkan dari hasil bertani padi saja.

Kondisi ini diperkuat dengan hasil jawaban yang disampaikan oleh wawancara dengan petugas lapangan berkaitan alasan kurangnya ada perubahan dari kegiatan bertani padi terhadap tingkat kesejahteraan petani padi, bahwa perubahan yang diharapkan dengan adanya penerapan program OPRM IP 200 kepada petani masih dirasakan petani belum ada perubahan yang berarti. Hal ini karena, petani menganggap bekerja sebagai petani padi bukanlah pekerjaan yang harus dikerjakan setiap waktu, mereka juga memiliki kerjaan lain untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan bahkan kegiatan tersebut sudah turun temurun dilakukannya dan hal ini sulit untuk dihilangkan.

Hal ini bila dikaitkan dengan petani padi di Kabupaten Pelalawan yang terbiasa dengan menanam satu kali setahun tetap akan lama kelamaan akan ikut berubah seiring dengan perubahan waktu untuk dapat menanam dua kali setahun walaupun memakan waktu.

### ***Site of Decision Making***

*Site of decision making* adalah keikutsertaan para petani dalam membicarakan masalah pelaksanaan program. Pada dasarnya kegiatan

yang dibuat pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari banyak kalangan, apalagi mereka yang turut berperan dalam pelaksanaannya. Kondisi ini juga semestinya terjadi pada program OPRM IP 200, yang mana petani diajak untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan program tersebut, sehingga dengan demikian petani akan dengan mudah mengikutinya. Hal ini sebagai langkah awal yang membuat pertanian padi akan berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditanyakan kepada petani berkaitan dengan keikutsertaannya dalam perencanaan program OPRM IP 200 dengan jawaban responden tentang keaktifan untuk turut berpartisipasi, jawaban responden tentang keikutsertaan petani dalam perencanaan program OPRM IP 200 di Kabupaten Pelalawan dijawab petani kurang baik. Hal ini menunjukkan petani kurang berpartisipasi dalam perencanaan program OPRM tersebut. Hal ini karena petani padi dari semula memang tidak diikutsertakan dalam perencanaan program. Program ini bukan merupakan keinginan dari petani padi, melainkan keinginan pemerintah melalui Dinas Pertanian dalam rangka meningkatkan hasil padi di daerah.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh petugas lapangan dari hasil wawancaranya berkaitan dengan peran serta petani dalam perencanaan program OPRM IP 200, bahwa dalam melaksanakan kegiatan program OPRM IP 200 ini pada dasarnya petani tidak diikutsertakan dalam perencanaannya. Petani hanya melaksanakan saja kegiatan, hal ini berdampak kepada keinginan petani dan keikutsertaan petani dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan di masa yang akan datang akan semakin rendah dan ini menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan program ini.

### ***Program Implementators***

*Program implementators* adalah kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan program. Pelaksanaan sebuah program perlu didukung oleh kesungguhan pihak pencetus ide, karena dengan demikian akan membawa sumber energy ke arah keberhasilan. Program OPRM yang merupakan program pemerintah dan diperuntukkan bagi petani padi, dilihat dari kesungguhan

sudah sungguh-sungguh dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari terealisasinya program ini dari tahun ke tahun, bahwa pemerintah pada dasarnya sudah memiliki kesungguhan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat melalui program OPRM ini, namun dalam pelaksanaannya ada kesan pemerintah kurang memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lapangan, berkaitan dengan masalah kesungguhan pemerintah daerah bahwa kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan program, oleh karena ketentuan pengaturan perundang-undangan mengatur, maka hal tersebut pelaksanaan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pembuat standar keberhasilan kebijakan perlu melakukan evaluasi secara terus menerus dari waktu ke waktu terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan dapat berjalan sebagaimana harapan semua pihak.

### ***Resources Committed***

*Resources committed* adalah komitmen sumberdaya dalam melaksanakan program. Sumber daya dalam hal ini adalah para petani yang melaksanakan dan sebagai sasaran kegiatan OPRM di Kabupaten Pelalawan. Petani di sini berperan sebagai pelaksana kegiatan penanaman padi dua musim, mereka mengoptimalkan penggunaan lahan yang digunakan untuk kepentingan peningkatan produktivitas padi. Deskripsi jawaban responden tentang kesungguhan petani dalam mengikuti program OPRM. Berdasarkan hasil data, dapat diketahui bahwa pada dasarnya petani sungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan penanaman, kemudian didukung oleh wawancara dengan petugas lapangan, kesungguhan petani ini memberikan makna dalam bentuk petani mengikuti arahan dan ketentuan yang dibuat pemerintah. Sehingga program berjalan sebagaimana ketentuan, walaupun masih belum menemukan tujuan akhirnya.

### **Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program OPRM**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian tentang faktor yang mempengaruhi implementasi

program OPRM IP 200 yang dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini dilihat dari komunikasi, sumberdaya, disposisi sikap dan birokrasi.

### **Komunikasi**

Komunikasi adalah kejelasan petani terhadap program dan teknis program dilaksanakan, komunikasi di sini membahas mengenai mengerti atau tidaknya para petani terhadap program OPRM IP 200 yang diselenggarakan dan dirancang pemerintah Kabupaten Pelalawan. Petani adalah warga masyarakat yang berdasarkan hasil penelitian seperti yang diuraikan di atas, kurang diajak untuk bermusyawarah mengenai program OPRM IP 200. Mereka hanya sekedar melaksanakan program yang dirancang pemerintah, hal ini membuat petani sendiri kurang mengetahui akan bagaimana program ini dirancang dan dijalankan.

Selain itu juga dijelaskan akibatnya petani juga hanya termotivasi mendapatkan proyek, yang dianggap petani sebagai bantuan langsung dari pemerintah yang diberikan secara cuma-cuma, sehingga mereka hanya mengikuti saja, tanpa ada upaya untuk mensukseskan program tersebut. Pengetahuan tentang program OPRM ini diperolehnya di lapangan setelah program ini berjalan, dan lebih banyak mereka mendapatkan informasi dari PPL di lapangan.

Faktor sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program OPRM IP 200 di Kabupaten Pelalawan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman petani akan kegiatan baik secara aturan maupun secara teknis di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut, jelas dapat diketahui bahwa sosialisasi yang masih kurang baik dilakukan pemerintah dalam rangka implementasi kebijakan OPRM IP 200 menyebabkan program belum berjalan dengan baik.

### **Sumberdaya**

Sumberdaya adalah ketersediaan sumberdaya penyuluh pertanian dan juga ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung program. Item yang ditanyakan antara lain: ketersediaan tenaga penyuluh pertanian di lapangan dalam rangka pelaksanaan program ini dan kelancaran

anggaran dari pemerintah dalam rangka melaksanakan program OPRM ini seperti untuk benih, peralatan dan pupuk. Bahwa ketersediaan tenaga penyuluh dan anggaran masih jadi masalah tersendiri.

Menurut Edward (1980) bahwa sumber-sumber (*resources*), memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena tidak akan efektif apabila sumber-sumber yang dibutuhkan tidak memadai. Sumber-sumber dimaksud dalam hal ini adalah unsur staf sebagai pelaksana pelayanan harus memiliki keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, dukungan lingkungan kerja serta adanya wewenang untuk melaksanakan kebijakan pelayanan umum. Oleh karena sumber penyuluh dan bahkan anggaran belum berjalan tepat waktu menyebabkan jalannya program implementasinya kurang maksimal.

### **Disposisi Sikap**

Disposisi sikap adalah dukungan petani dalam melaksanakan program OPRM IP 200. Item yang ditanyakan antara lain: sikap dalam melaksanakan program OPRM ini ke depan dan keinginan saudara untuk meningkatkan luas tanam pada masa ke depan. Sikap para pelaksana di lapangan terbukti tidak begitu berpengaruh, karena sikap petani sudah baik. Menurut Edward (1980) bahwa disposisi sikap, dimana dalam hal ini yang terpenting dalam implementasi kebijakan pelayanan umum adalah sikap petugas pelayanan yang mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah.

### **Struktur Birokrasi**

Suatu kebijakan seringkali melihat lembaga atau organisasi dalam implementasinya dan memerlukan koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga atau organisasi terkait. Ini berarti bahwa dalam melaksanakan kebijakan OPRM IP 200, masalah sikap pelaksana tidak menjadi faktor yang mempengaruhinya di lapangan, dan ini terbukti sikap para pelaksana sudah baik.

Birokrasi adalah dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program OPRM IP 200 kepada petani. Item yang ditanyakan antara lain: kemudahan prosedur yang dilalui dalam

melaksanakan program OPRM oleh petani dan pelaksana naan pembagian jatah kepada petani dalam rangka pelaksanaan kegiatan IP 200. Bahwa jawaban cukup baik sebanyak 56.5% ini berarti bahwa kurang baiknya struktur birokrasi dari program OPRM dan terakhir adalah jawaban kurang baik dan tidak baik sebanyak 16.6% tidak baiknya struktur birokrasi dari program OPRM. Menurut Edward (1980), suatu kebijakan seringkali melihat lembaga atau organisasi dalam implementasinya dan memerlukan koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga atau organisasi terkait.

Data-data hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi antara pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan dan pihak petani yang sebagai pelaku dilapangan perlu sejalan. Kemudian juga faktor sumber daya baik penyuluh maupun anggaran perlu sinergi sehingga kegiatan IP 200 dapat berjalan. Kemudian juga faktor petugas yang memahami permasalahan petani sehingga petani dapat bekerja dengan baik dan juga birokrasi yang berjalan perlu menyesuaikan diri dengan kondisi real di lapangan sehingga kegiatan dapat tepat sasaran.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan implementasi Program OPRM yang dilaksanakan di Kabupaten pelalawan pada kegiatan IP 200 belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari produksi padi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga petani juga tidak mengalami peningkatan hasil panennannya. Selain itu juga masalah pelaksanaan kegiatan IP 200 dalam rangka menambah musim tanam, masih mengalami kendala, seperti dapat diketahui kendala yang dalam pencairan dana program dari pemerintah, dimana anggaran dari pemerintah cair pada bulan juni sedangkan kegiatan IP 200 semestinya dilaksanakan pada bulan Februari.

Kondisi ini menjadi keterlambatan bagi petani dalam menggunakan biaya kegiatan penanaman IP 200. Hal ini diperparah lagi dengan penggunaan anggaran untuk musim tanam alami (September–Januari). Semestinya petani mengeluarkan biaya sendiri untuk musim tanam alami, malahan mereka menggunakan anggaran dari pemerintah untuk musim tanam tersebut, se-

dangkan untuk musim tanam Februari juga menunggu anggaran dari pemerintah daerah.

Dari enam indikator implementasi kebijakan OPRM IP 200, dapat diketahui indikator yang paling tinggi terletak pada kesungguhan petani dalam mengikuti program, hal ini menunjukkan bahwa petani sebagai pihak yang menerima kebijakan dan bahkan melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh melaksanakan program. Hal ini karena petani sangat berharap dengan program ini dapat berjalan mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan seperti peningkatan kesejahteraan.

Kemudian indikator yang paling rendah adalah pada masalah perubahan yang dirasakan petani, di sini analisa yang dapat dilakukan adalah, bahwasanya petani masih belum mendapatkan kesejahteraan dari apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini. Kebijakan masih mengalami kendala di pendanaan, pendanaan yang bersumber dari APBD ini tidak sesuai dengan musim tanam yang dilakukan masyarakat.

Faktor komunikasi antara pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan dan pihak petani yang sebagai pelaku dilapangan perlu sejalan. Kemudian juga faktor sumber daya baik penyuluh maupun anggaran perlu sinergi sehingga kegiatan IP 200 dapat berjalan. Kemudian juga faktor petugas yang memahami permasalahan petani sehingga petani dapat bekerja dengan baik dan juga birokrasi yang berjalan perlu menyesuaikan diri dengan kondisi real di lapangan sehingga kegiatan dapat tepat sasaran.

## **SIMPULAN**

Implementasi Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang dilaksanakan di Kabupaten pelalawan pada kegiatan IP 200 belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor komunikasi antara pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan dan pihak petani yang sebagai pelaku di lapangan perlu sejalan. Kemudian juga faktor sumber daya baik penyuluh maupun anggaran perlu sinergi sehingga kegiatan IP 200 dapat berjalan. Kemudian juga faktor petugas yang memahami permasalahan petani sehingga petani dapat bekerja dengan baik dan juga birokrasi yang berjalan perlu menyesuaikan

diri dengan kondisi real di lapangan sehingga kegiatan dapat tepat sasaran.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdul Wahab. Solachin. 1990. *Analisis Kebijaksanaan Negara* Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhadjir Darwin, 1993, *Pendidikan, Pembangunan, dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Yayasan Karya Darma.
- Riant D. Nugroho, 2006, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo.
- Sujianto, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Praktek)*, Pekanbaru: Alaf Riau
- Sunggono, Bambang. 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syafi'i, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Tangklisan, Nogi, Hesel S, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Lukman Offset
- Wibawa. Samodra, dkk. 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.